

DAFTAR ISI

Halaman

Halaman Persetujuan i

Halaman Pengesahan ii

Kata Pengantar iii

Daftar Isi vii

Surat Pernyataan Keaslian Skripsi xi

Daftar Lampiran xii

Ringkasan xiii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Tabel Orisinalitas	7
C. Rumusan Masalah	8
D. Tujuan Penelitian	9
E. Manfaat Penelitian	9
F. Sistematika Penulisan	9

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Umum Perkawinan	
1. Pengertian Perkawinan	11
2. Tujuan Perkawinan	14
3. Syarat Sah Perkawinan	15



4. Syarat Perkawinan Secara Islam.....	16
5. Azas atau Prinsip Dalam Perkawinan.....	19
B. Kajian Umum Pencatatan Perkawinan	
1. Pencatatan Perkawinan.....	26
2. Perkawinan Tidak Dicatatkan.....	28
C. Kajian Umum Tentang Hak Asasi Manusia	
1. Pengertian Tentang Hak Asasi Manusia.....	29
2. Ciri Khusus Hak Asasi Manusia.....	30
D. Kajian Umum Status Hukum Anak	
1. Pengertian Tentang Anak.....	30
2. Asal-Usul Anak.....	31
3. Hak-Hak Anak.....	32
E. Kajian Umum Akta Kelahiran	
1. Pengertian Akta Kelahiran.....	35
2. Manfaat Akta Kelahiran.....	36
F. Kajian Umum Pengadilan Agama	
1. Pengertian Pengadilan Agama.....	36
2. Tugas dan Kewenangan Pengadilan Agama.....	38

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....	39
B. Pendekatan Penelitian.....	40
C. Sumber Bahan Hukum.....	40
D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	42
E. Teknik Analisis Bahan Hukum.....	42
F. Definisi Konseptual.....	43

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Perkawinan Yang Sah.....	45
B. Perkawinan Yang Tidak Sah.....	46
C. Kasus Posisi Penetapan Nomor 0042/Pdt.P/2014/PA/Sda	
1. Para Pemohon.....	47
2. Kronologi dan Fakta Kasus.....	47
3. Alat-Alat Bukti Pemohon.....	49
4. Dasar Pertimbangan Hakim Menolak Permohonan.....	50
D. Kasus Posisi Penetapan Nomor 0268/Pdt.P/2014/PA.Sda	
1. Para Pemohon.....	52
2. Kronologi dan Fakta Kasus.....	52
3. Alat-Alat Bukti Pemohon.....	53
4. Dasar Pertimbangan Hakim Menerima Permohonan.....	54
E. Pembuktian	
1. Pengertian Pembuktian.....	61
2. Azas Pembuktian.....	62
3. Alat Bukti Menurut KUHPerdata.....	63
F. Status Anak Setelah Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010, Tanggal 17 Februari 2012.....	67
G. Pelanggaran Terhadap Hak Anak	69
H. Pelanggaran Orang Tua Yang Mengakibatkan Hak Anak Untuk Mendapatkan Akta Kelahiran Menjadi Tidak Terlaksana.....	73

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	75
--------------------	----

B. Saran 76

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

